



LAPORAN SINGKAT

KOMISI VIII DPR RI

BERMITRA DENGAN KEMENTERIAN AGAMA, KEMENTERIAN SOSIAL, KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA (KPAI), BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI (BPKH), BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS), DAN BADAN WAKAF INDONESIA (BWI).

Rapat Ke : 7
Tahun Sidang : 2018-2019
Masa Persidangan : III
Jenis Rapat/ke- : Rapat Kerja / ke - 4
Dengan : MENTERI AGAMA RI
Sifat Rapat : Terbuka
Hari, Tanggal : **Rabu, 9 Januari 2019**
Waktu : Pukul 13.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI Gedung Nusantara II lantai 1
Jl. Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270
Ketua Rapat : **Dr. H.M. ALI TAHER, S.H., M.Hum.**
Sekretaris Rapat : Sigit Bawono Prasetyo, S.Sos., M.Si.
Acara : “Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2018 dan Isu-isu Aktual”
Hadir : orang dari 50 orang Anggota Komisi VIII DPR RI.
1. Menteri Agama RI beserta jajarannya

I. PENDAHULUAN:

1. Ketua Rapat membuka Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI pada pukul 13.52 WIB dan dinyatakan Terbuka Untuk Umum.
2. Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi VIII DPR RI, DR. H.M. Ali Taher, S.H., M.Hum dengan didampingi Wakil Ketua DR. H. TB Ace Hasan Syadzily, M.Si, H. Marwan Dasopang. M.Si, H. Iskan Qolba Lubis, M.A., dan Dr. Ir. H. Sodik Mudjahid, M. Sc sesuai waktu dan tempat acara tersebut di atas.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Pada Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama RI membahas “**Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2018 dan Isu-isu Aktual**”, disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Komisi VIII DPR RI mengapresiasi dan menerima penjelasan Menteri Agama RI mengenai realisasi anggaran Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2018 per 9 Januari 2019 sebesar 93,21% atau sebesar Rp59.508.740.146.472,- (*lima puluh sembilan triliun lima ratus delapan miliar tujuh ratus empat puluh juta seratus empat puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah*) dari pagu anggaran sebesar Rp63.845.516.285.000,- (*enam puluh tiga triliun delapan ratus empat puluh lima miliar lima ratus enam belas juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah*).
2. Komisi VIII DPR RI mendesak Menteri Agama RI untuk bersungguh-sungguh memperhatikan dan menindaklanjuti pandangan Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI sebagai berikut:
 - a. Memaksimalkan serapan anggaran fungsi agama dan pendidikan pada tahun selanjutnya sehingga besaran anggaran yang terserap paling sedikit 95% (*sembilan puluh lima persen*).
 - b. Mengatasi hambatan-hambatan serapan anggaran bantuan sosial guna lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
 - c. Meningkatkan sosialisasi program bimbingan keluarga sakinah sebagai upaya pembinaan keluarga dan menurunkan angka pernikahan dini.
 - d. Mengoptimalkan edukasi dan sosialisasi serta memberikan solusi mengenai pentingnya Kerukunan Umat Beragama.
 - e. Lebih proaktif berkomunikasi dengan pemerintahan Arab Saudi mengenai pembatalan kebijakan rekam biometrik visa umrah.
 - f. Segera menyelesaikan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Jaminan Produk Halal untuk meningkatkan peran BPJPH sesuai dengan amanat Undang-undang.
 - g. Memperhatikan peningkatan kesejahteraan bagi guru agama di lingkungan Kementerian Agama.

- h. Meningkatkan sebaran pembangunan KUA di daerah dengan lebih proaktif berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah khususnya dalam mengatasi ketersediaan tanah.
 - i. Menyampaikan data mengenai instrumen penilaian indeks kesalihan sosial dan data angka nikah dan cerai di seluruh Kabupaten/Kota kepada Komisi VIII DPR RI sebagai bahan pengawasan.
3. Komisi VIII DPR RI mendesak Menteri Agama RI untuk menjamin netralitas Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Agama RI.
 4. Komisi VIII DPR RI akan menyelenggarakan rapat dengan pihak-pihak terkait dan melakukan kunjungan spesifik guna mendalami permasalahan di Rumah Sakit Haji Jakarta yang berada di bawah Kementerian Agama RI.

III. P E N U T U P

Rapat ditutup pukul 17.26 WIB.

PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI

KETUA,

ttd

Dr. H.M. ALI TAHER, SH., M.Hum.